

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Muhammad Asrun. 2004. *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Elsam. Jakarta.
- A'an Efendi dan Dessy Marliani Listianingsih. 2019. *Hukum Administrasi*. Cetakan II. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Citra Aditya. Bandung.
- Achmad Edi Subiyanto. 2019. *Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Ahmad Kamil. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Edisi Pertama. Kencana. Jakarta.
- Amran Suadi. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Cetakan Pertama. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Cetakan Pertama. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Aswanto. *Hukum dan Kekuasaan: Relasi hukum, politik dan pemilu*, Cetakan Pertama. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Aulia Sholichah Iman Nurchotimah. 2021. *Pengawasan Pelayanan Publik*. Jejak Pustaka. Yogyakarta.

- Bambang Sutiyo. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Benny K. Harman. 2013. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*. Cetakan Pertama. PT Gramedia. Jakarta.
- Duwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Hawa dan Ahwa. Pekanbaru.
- Fajar Laksono dan Subarjo. 2006. *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*. UII Press. Yogyakarta.
- Fajlurrahman Jurdi 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Pertama. Kencana. Jakarta.
- , 2016. *Teori Negara Hukum*. Setara Press. Malang.
- Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin. 2020. *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- H.M Agus Santoso. 2015. *Hukum. Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Prenadamedia. Jakarta.
- Hotma P. Sibuea dan Asmak ul Hosnah. 2020. *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional Problematika Wewenang Organ Negara dalam*

Penerapan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Cetakan I. Rajawali Pers. Depok.

Hufron dan Hadi Husodo. 2022. *Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia*. Cetakan Pertama. Jejak Pustaka. Yogyakarta.

Ibnu Chandranegara. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung.

Janpatar Simamora. 2013. *Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*. Cetakan Pertama. Capiya Publishing. Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Edisi Revisi. Konstitusi Press. Jakarta.

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. Depok.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2007. *Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Komisi Yudisial. Jakarta.

-----, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Cetakan Pertama. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. Jakarta Pusat.

Kristian. 2017. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complaint Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. An Image. Tangerang, Banten. Hlm.

4

Kurnia Saleh. 2020. *Catatan Negara Hukum Demokratis*. Guepedia. Jakarta.

Made Nurmawati, dkk. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Fakultas Hukum Unud. Denpasar.

Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers. Jakarta.

Miriam Budiarto. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan keempat. Gramedia. Jakarta.

Muchsin. 2004. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. STIH IBLAM. Jakarta.

Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti. 2020. *Panduan Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik*, Edisi Pertama, Kencana: Jakarta.

Ni'matul Huda. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. RajaGrafindo. Jakarta.

Noor Cholis (Penerjemah). 2012. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Terjemahan dari *The Indonesian Supreme Court, A Study of*

- Institutional Collaps*, Sebastian Pompe. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Jakarta.
- Nur Basuki Minarno. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama. Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2012. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Universitas Trisakti. Jakarta,
- Pontang Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Alumni. Bandung.
- Ridwan HR, 2014, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2014, *Hukum Admnistrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sina Chandranegara. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Suharyorno. 2020. *Hukum Pertanahan Di Indonesia*. Edisi I. Inteligencia Media. Malang.

Syamsuddin Noer. 2019. *Hak Ingkar Hakim Konstitusi*. Cetakan ke-1. PT Rajagrafindo Persada. Depok.

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Tedi Sudrajat. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Negara Indonesia Pasca UUD 1945*. Kencana. Jakarta.

Wiryanto. 2019. *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*. RajaGrafindo Persada. Depok.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Surat pemberitahuan Mahkamah Konstitusi Nomor 71.96/PUU/PAN.MKS/SPts/06/2022 Kepada Ketua DPR RI.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.

Universal Declaration of Human Rights.

JURNAL

Abu Daud Busroh dalam Efi Yulistyowati, dkk. "Penerapan Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen". *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 18. Nomor 2 Desember 2016.

Achmad Irwan Hamzani, "Mengagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, September-Desember 2014.

Ali Marwan HSB. "Mahkamah Konstitusi Sebagai *Neutralizer* Terhadap Lembaga Politik". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 2. Nomor 3 Desember 2013.

Choky R. Ramadhan, “*Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Pembentukan Hukum*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30, Nomor 2 Juni 2018.

Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi. “Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesi”. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. Vol IX. Nomor 1. April 2021

E. Fernando M. Manullang. “Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasionalisme”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 50. Nomor 2 September 2020.

Fais Yonnas Bo’a. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Tegaknya Cita Hukum (Rechts Idee) Pancasila Dalam Bernegara”. *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 13, Nomor 1 2020.

Fauziah Yumna dan Rahayu Subekti. “Otoritas Dan Implikasi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1. Nomor 3 2022.

Firman Floranta Adonara. “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12. Nomor 2 Juni 2015.

Hamdan Zoelfa. “Kekuasaan Kehakiman dalam Konstitusi dan Praktiknya di Negara Indonesia”. *Jurnal Hukum KONSIDERATUM UNS*. Vol. 2 tahun 2012.

Haposan Sialangan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia,
Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18, Nomor 2, 2016.

Haposan Sialangan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia".
Jurnal Sosiohumaniora. Vol. 18. Nomor 2 Juli 2016.

Henry Arianto. "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di
Indonesia". *Jurnal Lex Jurnalica*. Vol. 9, Nomor 3 Desember 2012.

Ibnu Sina Chandranegara, *Defining Judicial Independence and
Accountability Post Political Transition*, *Constitutional Riview*, Vol. 5,
Nomor 2 2019.

Idul Rishan. "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim
di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23. Nomor 2
April 2016.

Juan C. Botero and Alejandro Ponce dalam Zahermann Armandz
Muabezi, "Negara berdasarkan hukum (*rechtsstaats*) bukan
kekuasaan (*machtsstaat*)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6,
Nomor 3, 2017.

Junpantar Simamora. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14 Nomor 3 September 2014.

Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2013.

M. R. Baihaki, Fathudin dan A.T. Kharlie. "Problematisasi Kebijakan Hukum
Terbuka (*Open Legal Policy*) Masa Jabatan Hakim Konstitusi". *Jurnal
Konstitusi*. Vol. 17. Nomor 3 September 2020.

- Miriam Budiardjo dalam Vivi Ariyanti, Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2019.
- Mohammad Faisal Ridho. "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia". *Jurnal ADALAH:Buletin Hukum & Keadilan*. Vol. 1. Nomor 8e 2017.
- Muhammad Fadli Efendi. "Rekonstruksi Hukum Kewenangan Pengujian Tap Mpr Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Hukum Magnum_Opus*, Vol. 5. Nomor 1 Februari 2022.
- Ramli, dkk. "Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10. Nomor 2 Oktober 2019.
- Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis", *Jurnal Cepalo*, Vol, 3, Nomor 1 Januari-Juni 2009.
- Simabura, Charles, 2009, "Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, Nomor 2 Juli 2009.
- Susi Dwi Harijanti. "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 21. Nomor 4 2014.
- Vivi Ariyanti. "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 4. Nomor 2 Desember 2019.

Zaherman Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, Nomor 3 November 2017.

ARTIKEL/LAINNYA

Anonim. Pemberhentian Hakim MAHKAMAH KONSTITUSI Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan. [https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-Mahkamah Konstitusi-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/](https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-Mahkamah-Konstitusi-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/).

Anonim. Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme>.

CNN Indonesia. Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-darijabatan-hakim-konstitusi>.

Rofiq Hidayat, Jimly: Evaluasi Hakim Konstitusi Membahayakan Masa Depan, Negara, Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly--evaluasi-hakim-konstitusi-membahayakan-masa-depan-negara-hukum-lt635274e23eefc/?page=all>.

Utami Argawati. 2022. Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebelum Masa Jabatan, Berakhir.. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18715&menu=2>.

Asrul Sani. (Anggota Komisi III DPR RI). Wawancara terbuka Tim CNN Indonesia. Jakarta. 2 Oktober 2022.

United Nations Office on Drugs and Crime Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct.

Wawancara Aswanto oleh Tim Harian Kompas, Pada tanggal 25 November, 2022., Diakses, melalui, <https://bit.ly/Wawancarabersama-ProfAswanto>, Pada tanggal 23 Februari 2023.

Bivitri Susanti, 2022. Membaca Kembali Urgensi Kemandirian MK Pasca Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR. Seminar diselenggarakan oleh MHBK UGM dan CALS.

SKRIPSI DAN DISERTASI

Dukatis Zulmi. 2020. "MEKANISME PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

Fajlurrahman. 2008. "Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Mokhammad Ardafillah. 2016. "Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Masa Jabatannya Di Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Wildan Ansori Nasution, " Konstitusionalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Disertasi, Magister Hukum, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

MAKALAH

Jimly Asshidiqie, 2011. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah. Forum dialog perencanaan pembangunan hukum nasional yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan Ham.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 1416/UN4.5.1/PT.00/2023
Lampiran : -
Hal : **PENELITIAN** Makassar, 20 Februari 2023

Kepada
Yth. : KETUA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL KEPANITERAAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
di,
TEMPAT

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : Rismawati Nur
No. Pokok : B021191069
No. HP : 081944073958
Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Ramsis Unhas Unit 3 Blok E
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.
2. Fajurrahman, S.H., M.H.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP
PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI**

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



#generated_by_low_information_system_th-uh in 2023-02-20 08:30:57

1 dari 1

20/02/2023, 08.24

Scanned with CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114/P TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI
YANG DIAJUKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: dst.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., sebagai Hakim Konstitusi, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Hakim Konstitusi pengganti, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : dst.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Departemen Administrasi Aparatur,



Nanik Purwanti



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 71.96/PUU/PAN.MK/SPTs/06/2022

21 Juni 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020

Yth. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI**
di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6
Jakarta, 10270

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 11:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Panitera
Muhidin, S.H., M.Hum.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 71.96/PUU/PAN.MK/BASPTS/06/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 08:10 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta 10270.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 454/PP.00/03/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kurniasih Panti Rahayu

NIP : 19670530 199703 2 001

Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rismawati Nur

NPM : B021191069

Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Sesuai dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor : 1416/UN4.5.1/PT.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Penelitian untuk menyusun skripsi, dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan Wawancara dan Pengumpulan Data untuk penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi".

Adapun seluruh substansi yang terkandung di dalam penelitian tersebut, merupakan sepenuhnya tanggungjawab penulis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Maret 2023

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,
Kurniasih Panti Rahayu



Digital Signature
mk-1207415064230309080504

